

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan berfungsi untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal lain yang sama pada penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Sri Esnawati. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi UNY.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilihat dari sasaran, mekanisme pengusulan, pengambilan dana, pemanfaatan dana, dan tugas dan tanggung jawab, serta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran BSM di SMP N 15 Yogyakarta adalah peserta didik yang memiliki Kartu BSM sebanyak 15 peserta didik. Mekanisme pengusulan dimulai dari peserta didik menyerahkan Kartu BSM ke Guru BK. Guru BK merekapitulasi dan memverifikasi data peserta didik pemilik Kartu BSM untuk dikirim ke Kemdikbud melalui Disdik Kota Yogyakarta. SK penerima BSM dikeluarkan oleh Kemdikbud kemudian ditindak lanjuti oleh sekolah untuk mengambil dana BSM di kantor pos. Dana BSM diambil secara kolektif oleh Guru BK dengan

membawa surat kuasa yang ditanda tangani oleh peserta didik. Dana BSM diserahkan oleh Guru BK kepada peserta didik dan disaksikan oleh orang tua peserta didik. Dana BSM dimanfaatkan oleh peserta didik untuk membeli sepatu, seragam, alat tulis, tas, dan pianika. Tugas yang dilaksanakan oleh sekolah yaitu mendata peserta didik penerima Kartu BSM, mengirim laporan realisasi dana ke kantor pos dan Disdik Kota Yogyakarta, menerima pengaduan, dan memantau presensi peserta didik di sekolah. Tugas yang tidak dilaksanakan oleh sekolah yaitu menyusun skala prioritas peserta didik calon penerima BSM, membuat SK Kepala Sekolah, dan melakukan pembinaan dan evaluasi. Faktor pendukung implementasi: informasi yang diberikan secara rutin dari dinas ke sekolah, adanya rasa saling percaya terkait pemanfaatan dana, penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu mampu meningkatkan keakuratan sasaran. Faktor penghambat: pelaksana kebijakan di sekolah kurang beradaptasi dengan mekanisme baru, kurangnya pembinaan bagi peserta didik penerima bantuan, sulitnya mengumpulkan kuitansi pemanfaatan dana BSM dari peserta didik, terbatasnya dokumen atau arsip sekolah terkait BSM.

2. Budi Widodo. (2015). Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Pandak. Skripsi UNY.

Tujuan penelitian ini dirancang untuk mengetahui: (1) Kesiapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Cokroaminoto Pandak, (2) Pelaksanaan PIP di SMK Cokroaminoto Pandak, (3) Pemanfaatan dana

PIP di SMK Cokroaminoto Pandak, (4) Faktor-faktor yang mendukung pemanfaatan bantuan dana PIP di SMK Cokroaminoto Pandak, (5) Faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan bantuan dana PIP di SMK Cokroaminoto Pandak. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan model Countenance Stake yang meliputi aspek *Antecedents* (kesiapan penerima PIP), *Transactions* (pelaksanaan PIP), dan *Outcomes* (pemanfaatan PIP). Hasil Penelitian ini diketahui bahwa secara umum pelaksanaan Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, meliputi: (1) Aspek *Antecedents* (kesiapan penerima PIP) termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase kesiapan penerima PIP yaitu sebesar 78,75%, (2) Aspek *Transaction* (pelaksanaan PIP) termasuk kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase pelaksanaan PIP yaitu sebesar 74,61%, (3) Aspek *Outcomes* (pemanfaatan PIP) termasuk kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase pemanfaatan PIP yaitu sebesar 86,51%. Faktor pendukung pemanfaatan PIP antara lain: (1) Adanya pendataan awal peserta didik miskin, (2) Tim pelaksana PIP selalu sama, (3) Kebijakan sekolah mengelola dana PIP. Faktor Penghambat pemanfaatan PIP: (1) Kurangnya sosialisasi tentang PIP, (2) Pemberitahuan informasi yang selalu mundur, (3) Waktu pencairan tidak sesuai dengan kebutuhan, (4) Tidak ada monitoring dari dinas terkait.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ghafuur Kharisma Ramadhan pada tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Siswa

Miskin Sekolah Dasar (BSM SD) di Kecamatan Sambas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memang sangat mempengaruhi efektifitas Implementasi Program BSM tetapi faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi orang tua siswa sangat mempengaruhi bagi terlaksananya program BSM SD dengan efektif. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi dari orang tua siswa miskin tersebut. Implementor dituntut menemukan strategi untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa, seperti meningkatkan koordinasi dengan kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan kartu KPS sebagai syarat utama penerima BSM.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Esnawati pada tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilihat dari sasaran, mekanisme, pengusulan, pengambilan dana, dan tugas dan tanggung jawab, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran BSM di SMP N 15 Yogyakarta adalah siswa yang memiliki Kartu BSM sebanyak 15 siswa. Mekanisme pengusulan dimulai dari siswa menyerahkan Kartu BSM ke Guru BK. Guru BK merekapitulasi dan memverifikasi data siswa pemilik Kartu BSM untuk dikirim ke Kemdikbud melalui Disdik Kota Yogyakarta. Dana BSM diambil secara kolektif oleh Guru BK dengan membawa surat kuasa

yang ditandatangani oleh siswa. Dana BSM diserahkan oleh Guru BK kepada siswa dan disaksikan oleh orang tua siswa. Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk membeli sepatu, seragam, alat tulis, tas, dan pianika. Faktor pendukung implementasi: informasi yang diberikan secara rutin dari dinas ke sekolah, adanya rasa saling percaya terkait pemanfaatan dana, penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu mampu meningkatkan keakuratan sasaran.

Kesimpulan dari beberapa penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu terletak pada waktu, tempat maupun objek dalam penelitian sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat memperbarui informasi atau data penelitian selanjutnya.

B. Kerangka Dasar Teoritik

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan"

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: "Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: "Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari teoritik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program".

Fullan dan Pomfret (1997) menjelaskan bahwa "... *implementation refers to the actual use of an innovation on what innovation consist of in practice*". Pengertian lain dikemukakan Pressman dan Wildavsky (1973) yang mengatakan implementasi sebagai "... *accomplishing, fulfilling, carrying out, producing, and completing a policy*". Sementara itu, Tornatzky dan Jhonson (1982) membuat batasan tentang implementasi

sebagai "... *the translation of any tool, technique, process or method of doing from knowledge to practice*". Dengan demikian, tindakan melaksanakan atau lebih tepat disebut mewujudkan apa yang telah ditetapkan sebagai kebijakan merupakan pandangan yang hampir sama diantara para ahli bahwa ketika kebijakan ditetapkan, maka saat itu merupakan awal dari suatu kegiatan implementasi. Tanpa adanya proses implementasi sebagai salah satu titik yang menentukan dalam keseluruhan proses inovasi, maka tidak akan dapat diketahui daya guna dan hasil guna suatu inovasi.

Dalam teori dari Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut dengan indikator-indikator dibawah ini:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

f. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Dalam penelitian ini teori yang relevan dengan di lapangan menerapkan Teori Edward. Edward dalam Joko Widodoo (2006:) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif antara lain *communication, resource, disposition or attitude dan bureaucratic structure*.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar seperti anggota masyarakat lain (Abdulsyni, 2012:190). Kemiskinan terjadi karena adanya lembaga dalam masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik yaitu lembaga ekonomi. Faktor ekonomi sering dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Terdapat kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin antara lain orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif selain kekuatan jasmani. Perkembangan dan terpeliharanya kekayaan tersebut tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh layanan umum seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan penyediaan air yang pada umumnya tidak tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan dan peningkatan pendapatan kaum miskin tidak akan

memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka tidak tersedia. (Abdulsyani, 2012:191)

Pada umumnya kemiskinan dikategorikan dalam tiga unsur antara lain kemiskinan yang disebabkan handicap badaniah atau mental; kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam; dan kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan sering dibet dengan kemiskinan struktural, kemiskinan ini timbul akibat

struktur-struktur dalam masyarakat seperti struktur ekonomi, politik, sosial atau kultur. Kemiskinan struktural menjadi udaya yang mempunyai struktur dan turun temurun melalui jalur keluarga. Para teoritis kemiskinan mengelompokkan pendekatan kemiskinan menjadi tiga macam pendekatan yaitu:

a. Pendekatan kultural.

Pendekatan ini dikemukakan oleh antropologi Oscar Lewis bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang disebabkan oleh penderitaan ekonomi yang lama (pada msa penjajahan) atau akibat pemerintahan yang korup dan otoriter sehingga menjadikan masyarakat dengan ciri-ciri budaya sebagai berikut:

- 1) Sistem ekonomi yang ada berorientasi pada keuntungan belaka bukanberorientasi pada kesejahteraan sosial.
- 2) Angka pengangguran tinggi dan tidak memiliki keahlian, sehingga apabiladiberdayakan sulit terangkat.
- 3) Upah yang berlaku dalam sistem kepegawaian sangat rendah.

- 4) Masyarakat miskin tidak memiliki kekuatan dalam organisasi politik, ekonomi dan sosial karena adanya dominasi kaum kapitalis.
- 5) Terbentuknya kelas masyarakat yang dominan yang mendominasi segala sumber daya yang membentuk hegemoni kekuasaan.

Solusi bagi kemiskinan pendekatan kultural adalah perlu membangun organisasi untuk menyatukan orang miskin baik dalam bentuk gerakan religius atau warna ideologi yang memberikan harapan serta mengikat solidaritas dengan kata lain perlu dikembangkan gerakan kemampuan berpretasi untuk mengubah budaya miskin.

b. Pendekatan struktural.

Pendekatan ini dinyatakan oleh Charles Valentine bahwa kemiskinan sebagai akibat situasi struktur sosial yang menekan sehingga kehilangan peluang kegiatan ekonominya. Valentine beranggapan ada kelompok dalam masyarakat tertentu dengan status dan peranan menekan sebagian besar masyarakat dari kelompok masyarakat tersebut sehingga kehilangan peluang kegiatan ekonominya. Solusi untuk mengatasi kemiskinan ini yaitu perlu adanya perubahan dalam hal penyediaan sumber bagi kelompok miskin, melakukan perubahan struktur sosial masyarakat dan melakukan perubahan dalam subkultur masyarakat.

c. Pendekatan interaksional-kultur

Pendekatan interaksional-kultur dengan struktur sosial yang dinyatakan oleh Herbert J. Gans bahwa kemiskinan timbul sebagai akibat

hasil interaksi antara faktor kebudayaan yang sudah tertanam dalam diri orang miskin dengan faktor situasi yang menekan. Adanya masyarakat miskin sebagai warisan dari generasi sebelumnya sedangkan lainnya miskin itu berlangsung secara periodik. Sebagian orang ada yang bertambah miskin dan sebagian lagi ada yang bertambah baik kehidupannya. Solusi untuk kemiskinan yaitu menggunakan kesempatan yang ada disertai usaha memberikan keyakinan diri untuk menggunakan kesempatan tersebut. (Soelaeman, 2005:228)

3. Program Indonesia Pintar

a. Pengertian dan Tujuan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. PIP menjangkau peserta didik dari jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal (SKB/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan).

Tujuan dari program ini antara lain: meningkatkan akses bagi anak

usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik peserta didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan (LKP)/ Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

b. Sasaran Program Indonesia Pintar

Sasaran PIP adalah anak yang berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan:

- 1) Penerima BSM 2014 pemegang KPS;
- 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Indonesia Pintar yang belum menerima BSM tahun 2014;
- 3) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
- 4) Peserta didik yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu dari panti sosial /pantiasuhan;
- 5) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
- 6) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (*drop out*) yang

diharapkan kembali bersekolah;

- 7) Peserta didik dari keluarga miskin/ rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah, dari orangtua PHK, di daerah konflik dan keluarga terpidana berada di LAPAS, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah;
- 8) SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian (bidang agrobisnis, agroteknologi), perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman; dan
- 9) Peserta didik pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

c. Besaran Dana Program Indonesia Pintar

Besaran dana PIP tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Jenjang SD/Paket A untuk peserta didik kelas I, II, III, IV dan V diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 450.000,- dan peserta didik kelas VI diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,-
- 2) Jenjang SMP/Paket B untuk peserta didik kelas VII dan VIII diberikan dana sebesar Rp750.000,- dan peserta didik kelas XI diberikan dana sebesar Rp375.000,-.
- 3) Jenjang SMA/Paket C untuk peserta didik kelas X dan XI diberikan dana sebesar Rp1.000.000,- dan peserta didik kelas XII tahun ajaran 2014/2015 diberikan dana sebesar Rp500.000,-

- (4) Jenjang SMK untuk peserta didik kelas X dan XI diberikan dana sebesar Rp1.000.000, dan peserta didik kelas XII diberikan dana sebesar Rp500.000,

d. Prinsip Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Efisien: Diusahakan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Efektif: Harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 3) Transparan: Menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.
- 4) Akuntabel: Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Kepatutan: Penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- 6) Manfaat: pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar terdapat kartu yang digunakan untuk mendukung program tersebut, kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Kejar Paket A/B/C) atau lembaga pelatihan maupun kursus. KIP yang dibagikan ke masyarakat berdasarkan hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, mengenai siapa yang berhak memperoleh kartu tersebut sistem yang memilih. KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah dan menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Peserta didik yang sudah menerima KIP wajib memberikan konfirmasi kepada sekolah dengan cara menyerahkan fotocopi Kartu Indonesia Pintar. Hal tersebut dapat digunakan untuk proses pencairan dana dan validasi data penerima KIP. Apabila terdapat peserta didik dari keluarga yang kurang mampu belum memperoleh KIP, maka peserta didik tersebut dapat menggunakan KKS atau KPS (Kartu Perlindungan Sosial) untuk memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membawa KKS/KPS yang dimiliki beserta dokumen yang mendukung seperti Kartu Keluarga/KK atau Surat Keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga KPS/KKS (jika anak/keluarga tidak memiliki KK) ke sekolah/madrasah tempat anak terdaftar.

- 2) Sekolah/madrasah akan mencatat data anak tersebut ke dalam daftar calon penerima KIP untuk kemudian direkap ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 3) Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyerahkan daftar rekap itu ke Kemendikbud/Kemenag.
- 4) Kemendikbud/Kemenag akan mencatat serta mengirimkan KIP tambahan untuk peserta didik/anak ke alamat sekolah/rumah tangga.

3. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar

Implementasi Indonesia Pintar berarti pelaksanaan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut dengan PIP dilaksanakan dengan melibatkan instansi antara lain direktorat teknis, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, tingkat sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dan lembaga penyalur. Lembaga penyalur untuk tingkat SMA adalah Bank BNI. Mekanisme pelaksanaan PIP meliputi:

a. **Mekanisme pengusulan**, pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Untuk peserta didik dari keluarga pemegang KPS atau KKS atau KIP, untuk peserta didik sekolah formal, sekolah mengentri (updating) data peserta didik (nomor KPS/KKS/KIP) calon

penerima PIP 2015 dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan peserta didik calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan direktorat teknis.

- 2) Peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP baik peserta didik sekolah formal maupun peserta didik dari SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya dari keluarga miskin/rentan miskin yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP, dapat diusulkan oleh sekolah/lembagapendidikan nonformal setelah peserta didik dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP2015 pada tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana BSM/PIP 2015 berdasarkan alokasi sementara sasaran per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktorat teknis dengan prioritas tertentu;
 - b. Sekolah mengusulkan peserta didik hasil seleksi sebagai penerima PIP 2015 melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman: pip.kemdikbud.go.id ke

dinas pendidikan kabupaten/kota;

- c. Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan ke direktorat teknis terkait daftar/usulan peserta didik calon penerima BSM/PIP 2015 (dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal). Data ini merupakan usulan peserta didik calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

b. Mekanisme Penetapan Penerima, mekanisme penetapan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- 1) Direktorat teknis menerima usulan calon peserta didik penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan.
- 2) Direktorat teknis menetapkan peserta didik penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan propinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

a. Mekanisme Penyaluran, mekanisme penyaluran meliputi:

- 1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima BSM/PIP 2015 yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening.
- 2) Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktorat.

- 3) KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.

Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindah bukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyalurandana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur.

- 4) Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima PIP kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima.
- 5) Peserta didik mengambil/mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur.

Penyaluran dana PIP kepada penerima dilakukan melalui TabunganKu atau *virtual account*.

b. Mekanisme Pengambilan Dana

Pengambilan atau pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik di lembagapenyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Membawa dokumen berupa surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga, foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN serta KTP orangtua/wali

(Untuk SD dan SMP). Untuk SMA membawa kartu pelajar atau identitas pribadi (KTP/KK).

- 2) Menandatangani bukti penerimaan dana BSM/PIP 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur.
- 3) Untuk peserta didik SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal satu orang guru/orang tua/wali.
- 4) Bagi penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat dicairkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan.
- 5) Bagi penerima PIP yang menggunakan *virtual account* dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana BSM/PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/ kepala lembaga pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:
 - a) Surat kuasa kolektif dari orang tua peserta didik penerima BSM/PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
 - b) Sekolah/lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan

pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

- c) Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
 - d) Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM/PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (format terlampir);
 - e) Penerima kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur; Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga; foto kopi halaman biodata raport masing-masing peserta didik;
- Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo di lokasi penelitian dengan model kualitatif pendekatan fenomenologi. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif, maka dilakukan observasi langsung untuk mendapatkan kondisi alamiah di lapangan (*Natural Setting*). Data wawancara dan dokumentasi hasil penelitian dilakukan analisis deskriptif. Analisis terdiri dari organisasi data, pemahaman untuk menemukan tema dan interpretasi dengan dikaitkan pada teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.

